



Mahasiswa Menuntut Keadilan: Mengurai Aksi Demonstrasi atas Kenaikan Tunjangan Anggota DPR dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Karolus Teguh Santoso^{1*}, Teresia Noiman Derung²

¹⁻² Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, STP-IPI Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: karolus.teguh@gmail.com

Abstract. *This article discusses the phenomenon of student demonstrations against the policy of increasing allowances for members of the House of Representatives (DPR) through the perspective of the sociology of education. The allowance increase, perceived as a form of political elites' insensitivity to the economic conditions of society, triggered a wave of student protests that regarded the policy as a symbol of structural injustice. This study employs a literature review method by examining academic literature, sociological theories, and relevant media reports. The analysis is conducted using the approaches of structural functionalism and conflict theory. From the functionalist perspective, student actions are understood as a response to social dysfunctions that disrupt societal stability, while conflict theory emphasizes the dimension of class struggle between political elites and the wider community. Education, in this context, plays a central role in shaping students' critical awareness through curriculum, academic interactions, and organizational experiences that cultivate sensitivity to issues of social justice. Student demonstrations are not spontaneous reactions, but manifestations of an educational process that fosters critical and reflective thinking as well as the courage to challenge the status quo. This movement demonstrates that students serve as agents of change who not only advocate for public interests but also safeguard morality and the accountability of power. Thus, this phenomenon underscores the strategic role of higher education in producing a generation that is critically empowered and committed to democracy and social justice, while also highlighting that student actions hold significant relevance in maintaining the balance between the state, society, and academic ideals*

Keywords: *Educational Sociology; Students as Agents Of Change; Social Justice; Structural Functionalism Theory; Conflict Theory*

Abstrak. Artikel ini membahas fenomena demonstrasi mahasiswa atas kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menggunakan perspektif sosiologi pendidikan. Kenaikan tunjangan yang dipandang sebagai bentuk ketidakpekaan elit politik terhadap kondisi ekonomi masyarakat memicu gelombang protes mahasiswa yang melihat kebijakan tersebut sebagai simbol ketidakadilan struktural. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, teori sosiologi, serta laporan media terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Dari perspektif fungsionalisme, aksi mahasiswa dipahami sebagai respons terhadap disfungsi sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat, sementara teori konflik menekankan dimensi pertarungan kelas antara elit politik dan masyarakat luas. Pendidikan, dalam hal ini, berperan sentral dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa melalui kurikulum, interaksi akademik, dan pengalaman organisasi kemahasiswaan yang menumbuhkan kepekaan terhadap isu keadilan sosial. Demonstrasi mahasiswa bukanlah reaksi spontan, melainkan manifestasi dari proses pendidikan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, serta keberanian untuk menantang status quo. Gerakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa berfungsi sebagai agent of change yang tidak hanya mengadvokasi kepentingan publik, tetapi juga menjaga moralitas dan akuntabilitas kekuasaan. Dengan demikian, fenomena ini menegaskan peran strategis pendidikan tinggi dalam mencetak generasi yang berdaya kritis sekaligus berkomitmen terhadap demokrasi dan keadilan sosial, serta memperlihatkan bahwa aksi mahasiswa memiliki relevansi penting dalam menjaga keseimbangan antara negara, masyarakat, dan idealisme keilmuan.

Kata kunci: Sosiologi Pendidikan; Mahasiswa sebagai Agen Perubahan; Keadilan Sosial; Teori Fungsionalisme Struktural; Teori konflik

1. LATAR BELAKANG

Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu menjadi topik yang sensitif dan sering kali memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Di satu sisi, argumen yang mendukung kenaikan ini berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh para wakil rakyat, serta sebagai upaya untuk

menjaga integritas dan mencegah korupsi (Pane & Haryanto, 2023). Mereka juga sering kali merujuk pada perbandingan tunjangan dengan legislator di negara lain. Namun, di sisi lain, kebijakan ini secara terus-menerus memantik amarah dan kritik pedas dari berbagai lapisan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sulit. Banyak orang melihatnya sebagai contoh nyata dari ketidakadilan sosial, di mana jurang antara kaum elit politik yang mendapatkan berbagai fasilitas dan masyarakat umum yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari semakin melebar (Mukhtar & Lailam, 2021). Sentimen ini diperkuat oleh fakta bahwa kenaikan tunjangan sering kali terjadi di saat pemerintah menyerukan penghematan atau ketika harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, menciptakan persepsi bahwa para pejabat negara tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

Kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakadilan yang terasa ini menjadi pemicu utama bagi gelombang demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi ini tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai akumulasi dari kekecewaan, rasa frustrasi, dan keresahan sosial yang sudah lama terpendam (Maulani, 2025). Mahasiswa, dengan posisi strategis mereka sebagai kelompok intelektual dan idealis, melihat kenaikan tunjangan ini bukan hanya sebagai masalah finansial, tetapi sebagai representasi dari kegagalan sistemik dalam mewujudkan keadilan sosial (Fithroyatirrizqoh, 2024). Aksi mereka bukan sekadar respons spontan, melainkan sebuah pernyataan politik dan moral yang kuat. Protes ini mencerminkan peran historis mahasiswa sebagai *agent of change*, yang secara konsisten berdiri di garis depan perjuangan melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan (Trisiana & Syakti, 2021). Mereka menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak terwakili dan menuntut transparansi, akuntabilitas, serta empati dari para pemimpin.

Artikel ini bertujuan untuk mengupas tuntas fenomena demonstrasi mahasiswa ini dari perspektif sosiologi pendidikan. Penulis akan menganalisis bagaimana pendidikan, sebagai sebuah institusi sosial, berperan dalam membentuk kesadaran kritis dan politik mahasiswa. Lebih lanjut, kami akan membahas bagaimana kurikulum, lingkungan akademik, dan interaksi sosial di kampus berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran akan peran mereka sebagai agen perubahan. Melalui analisis ini, kami ingin menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa bukanlah sekadar ekspresi emosi sesaat, tetapi merupakan manifestasi dari proses pendidikan yang telah membentuk pola pikir mereka untuk mempertanyakan status quo, menantang otoritas, dan memperjuangkan keadilan (Amri, 2023).

Sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan ini, artikel ini akan menggunakan teori teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung, dan setiap bagian memiliki fungsi

tertentu untuk menjaga stabilitas (Nugroho, 2021). Dari sudut pandang ini, demonstrasi mahasiswa dapat dilihat sebagai mekanisme penyesuaian sosial yang menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kebijakan yang dianggap tidak adil. Selain itu, artikel ini juga akan menggunakan konsep konflik sosial dari Karl Marx untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya (dalam hal ini, tunjangan) menciptakan ketegangan antara kelas-kelas sosial, memicu konflik (Nendissa, 2022). Teori ini relevan untuk menjelaskan dinamika kekuasaan dan perjuangan yang terjadi antara para wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mengapa mahasiswa memilih untuk turun ke jalan dan apa yang mendasari aksi mereka dari sudut pandang sosiologi pendidikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Aksi demonstrasi mahasiswa menuntut keadilan atas kenaikan tunjangan anggota DPR dapat dianalisis secara mendalam melalui dua lensa sosiologi utama: Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik. Dari perspektif fungsionalisme, yang dipelopori oleh Émile Durkheim, pendidikan berfungsi untuk mengintegrasikan individu ke dalam struktur sosial dan menanamkan nilai-nilai kolektif yang esensial untuk stabilitas masyarakat (Derung, 2025). Dalam konteks ini, demonstrasi mahasiswa dapat diinterpretasikan sebagai disfungsi atau ketidakseimbangan sistemik. Ketika lembaga negara, seperti DPR, mengambil keputusan yang dianggap melanggar norma keadilan dan kesejahteraan kolektif nilai-nilai yang juga diajarkan di lembaga Pendidikan maka sistem sosial mengalami ketegangan. Respons mahasiswa, yang idealnya telah disosialisasikan untuk menjadi warga negara yang sadar dan kritis, menjadi upaya untuk mengoreksi ketidakseimbangan ini dan mengembalikan fungsi sistem ke jalurnya (Setyoko & Satria, 2021). Aksi mereka adalah indikasi bahwa sistem politik dan ekonomi gagal memenuhi ekspektasi masyarakat, dan mahasiswa tampil untuk menyuarakan ketidakpuasan tersebut.

Teori Konflik, yang berakar dari pemikiran Karl Marx dan Ralph Dahrendorf, menawarkan pandangan yang lebih konfrontatif. Teori ini melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan dan sumber daya (Raho, 2019). Dalam kasus ini, demonstrasi mahasiswa adalah manifestasi dari konflik antara kelompok yang berkuasa (anggota DPR yang memiliki otoritas untuk menaikkan tunjangan) dan kelompok yang tidak berkuasa (mahasiswa dan masyarakat umum yang menanggung dampak dari kebijakan tersebut). Pendidikan, dalam sudut pandang ini, bukanlah sekadar alat untuk integrasi, melainkan juga arena perjuangan ideologis. Mahasiswa, yang terpapar pada

pengetahuan kritis dan idealisme, menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang menantang ideologi dominan yang membenarkan ketidakadilan sosial. Mereka menggunakan pendidikan mereka sebagai platform untuk membongkar narasi kekuasaan, menyuarakan perlawanan terhadap ketidaksetaraan, dan menuntut distribusi sumber daya yang lebih adil (Barung, 2023). Dengan demikian, protes mahasiswa bukan hanya reaktif, tetapi proaktif, bertujuan untuk merevolusi tatanan sosial yang dianggap eksploitatif.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka atau tinjauan literatur, yang berfokus pada analisis mendalam dari sumber-sumber yang relevan dan aktual. Proses ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi sistematis terhadap berbagai literatur akademis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas fenomena demonstrasi mahasiswa, sosiologi pendidikan, dan teori-teori sosial yang relevan seperti fungsionalisme struktural dan teori konflik. Selain itu, artikel ini juga merujuk pada berita dan laporan media massa yang mencerminkan peristiwa terkini terkait kenaikan tunjangan anggota DPR dan respons publik terhadapnya. Data kualitatif yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi argumen, tren, dan dinamika sosial yang mendasari aksi mahasiswa. Analisis ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang kuat, yang menghubungkan peran pendidikan dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa dengan aksi mereka sebagai agen perubahan. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif dan aktual mengenai alasan di balik aksi mahasiswa dari sudut pandang sosiologi pendidikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sebagai Pembentuk Kesadaran Kritis dan Tanggung Jawab Sosial

Pendidikan perguruan tinggi merupakan institusi sosial yang kompleks, di mana peran dan fungsinya sering kali berada dalam ketegangan yang kontradiktif. Dari perspektif Teori Fungsionalisme, universitas berfungsi sebagai agen sosialisasi yang mempersiapkan individu untuk berintegrasi dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan sistem sosial. Namun, di sisi lain, Teori Konflik menyoroti bahwa pendidikan juga dapat menjadi arena perjuangan di mana ideologi dominan ditantang (Ruagadi et al., 2025). Universitas tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi, mengkritik, dan pada akhirnya menentang ketidakadilan struktural, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan

ketimpangan kekuasaan yang tercermin dalam kenaikan tunjangan anggota DPR. Dengan demikian, pendidikan menciptakan paradoks: di satu sisi ia mengintegrasikan, di sisi lain ia memberdayakan mahasiswa untuk melawan sistem yang dianggap korup atau tidak adil (Muthi'ah Lathifah & Yakobus Ndona, 2024).

Peran ini tidak terlepas dari kontribusi kurikulum dan peran para dosen dalam proses belajar-mengajar. Mata kuliah di bidang ilmu sosial dan humaniora, seperti sosiologi, ilmu politik, dan filsafat, tidak sekadar menyajikan teori-teori abstrak. Sebaliknya, mereka dirancang untuk menumbuhkan sensitivitas sosial dan menanamkan kesadaran kritis terhadap masalah-masalah kontemporer (Nunik Hidayati et al., 2024). Sebagai contoh, pembahasan mengenai teori keadilan sosial dari John Rawls atau analisis kebijakan publik yang tidak memihak, secara fundamental mengasah kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu ketidakadilan. Diskusi-diskusi tersebut tidak hanya mendorong mahasiswa untuk memahami masalah, tetapi juga memotivasi mereka untuk merumuskan solusi dan mengambil tindakan (Khairul Rahmat et al., 2025). Dosen, sebagai fasilitator pengetahuan, memainkan peran krusial dalam menantang mahasiswa untuk berpikir di luar batas-batas konvensional dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang kekuasaan, privilese, dan hak-hak sipil (Adolph, 2022).

Selain kurikulum formal, ruang partisipasi mahasiswa juga memainkan peran vital dalam membentuk kesadaran politik dan tanggung jawab sosial. Organisasi kemahasiswaan, seperti senat mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa, berfungsi sebagai "laboratorium" mini untuk mobilisasi dan partisipasi politik. Di lingkungan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam berorganisasi, bernegosiasi, merumuskan tuntutan, dan membangun aliansi (Hanung Aulia et al., 2024). Mereka belajar bagaimana menyusun strategi, mengartikulasikan aspirasi kolektif, dan memobilisasi massa secara efektif. Pengalaman-pengalaman ini melengkapi pengetahuan teoretis yang didapatkan di kelas dan mengubah mereka dari sekadar pelajar pasif menjadi aktor-aktor politik yang aktif. Partisipasi dalam organisasi ini melatih mereka untuk menjadi pemimpin yang berani dan bertanggung jawab, siap untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tidak populis (Isma & Yusuf, 2025).

Demonstrasi mahasiswa atas kenaikan tunjangan anggota DPR bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari proses sosialisasi yang mendalam dan multidimensi di dalam institusi pendidikan. Mahasiswa, yang dibekali dengan pengetahuan teoretis dan pengalaman praktis dalam berorganisasi, menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka memanfaatkan posisi mereka sebagai kelompok terdidik dan idealis untuk menantang ketidakadilan sosial dan menuntut akuntabilitas dari para pemegang kekuasaan. Aksi mereka

menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang kritis, berempati, dan siap untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara (Maulana, 2022).

Kenaikan Tunjangan DPR: Simbol Ketidakadilan dan Pemicu Gerakan

Kenaikan tunjangan anggota DPR, yang secara nominal terlihat sebagai keputusan finansial rutin, sesungguhnya merupakan simbol ketidakadilan struktural yang mendalam dalam masyarakat. Analisis menggunakan Teori Konflik mengungkapkan bahwa isu ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar angka-angka, melainkan cerminan dari kesenjangan kekuasaan dan ekonomi yang signifikan antara elit politik dan rakyat (Gultom & Fauzi, 2021). Para anggota DPR, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan legislatif, secara unilateral mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, sementara mayoritas masyarakat berjuang menghadapi tantangan ekonomi (Saputra, 2025). Aksi demonstrasi mahasiswa, oleh karena itu, bukanlah sekadar protes spontan, tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural ini. Mereka menantang distribusi sumber daya yang tidak seimbang dan mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Dalam perspektif Teori Konflik, mahasiswa bertindak sebagai kelompok yang tertindas yang menolak untuk menerima status quo, menggunakan aksi kolektif sebagai alat untuk menuntut keadilan.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini berhasil mendapatkan dukungan luas karena mereka secara cerdas menggunakan strategi pembingkaihan (framing) isu. Mereka tidak hanya mengkritik kenaikan tunjangan, tetapi berhasil membingkainya sebagai "pengkhianatan terhadap rakyat" dan "pemborosan uang negara di tengah kesulitan ekonomi" (Krisnanto, 2023). Pembingkaihan ini berhasil menyentuh sentimen publik yang sudah lama merasa tidak puas dengan kinerja para wakil rakyat. Dengan memosisikan isu ini dalam narasi yang lebih besar tentang moralitas, empati, dan keadilan sosial, mahasiswa mampu menciptakan resonansi yang kuat. Pembingkaihan yang kuat inilah yang membuat tuntutan mereka tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan sebagai masalah bersama oleh masyarakat luas. Ini memotivasi banyak orang untuk tidak hanya mendukung secara verbal, tetapi juga bergabung dalam aksi protes, memperkuat legitimasi gerakan dan menempatkan tekanan lebih besar pada pemerintah (Nastatih & Rachmaria, 2020).

Dalam konteks sosiologi pendidikan, keberhasilan mahasiswa dalam mengadvokasi isu ini juga menunjukkan bagaimana institusi pendidikan berfungsi sebagai katalisator kesadaran kritis. Melalui paparan terhadap teori-teori sosial, sejarah pergerakan, dan diskusi-diskusi di lingkungan akademis, mahasiswa dibentuk menjadi agen perubahan yang mampu

mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ketidakadilan (Amri, 2023). Mereka tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi dilatih untuk menjadi pemikir yang kritis dan aktif. Kenaikan tunjangan DPR menjadi kasus studi nyata yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam praktik sosial. Oleh karena itu, demonstrasi ini merupakan manifestasi dari hasil proses pendidikan yang menumbuhkan kesadaran akan peran mereka sebagai penjaga moral dan suara nurani rakyat, membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya tentang penguasaan ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial (Iskandar, 2023).

Dinamika Mobilisasi dan Aksi Protes Mahasiswa

Mobilisasi dan aksi protes mahasiswa terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR merupakan fenomena yang dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan teori gerakan sosial. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok masyarakat mengorganisasi diri untuk menuntut perubahan sosial. Dalam konteks ini, demonstrasi mahasiswa tidak hanya muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses yang terorganisir dan strategis. Aspek krusial pertama adalah mobilisasi sumber daya. Mahasiswa, sebagai aktor kolektif, berhasil mengumpulkan berbagai sumber daya yang esensial untuk keberhasilan aksi mereka (Subaktiar, 2020). Hal ini mencakup sumber daya finansial yang mungkin didapat dari iuran internal atau donasi, sumber daya personel berupa partisipasi aktif dari ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, serta sumber daya logistik seperti spanduk, sound system, dan perlengkapan lainnya. Lebih dari itu, peran teknologi, khususnya media sosial, menjadi krusial. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok berfungsi sebagai alat utama untuk menyebarkan informasi secara cepat, mengkoordinasikan jadwal dan lokasi aksi, serta membangun narasi perlawanan yang kuat dan viral. Kecepatan dan jangkauan media sosial memungkinkan gerakan ini menjangkau audiens yang lebih luas dan mendapatkan dukungan publik secara masif (Nofrima & Qodir, 2021).

Dinamika gerakan ini juga sangat dipengaruhi oleh struktur kesempatan politik yang terbuka. Kenaikan tunjangan anggota DPR terjadi pada saat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif berada di titik rendah akibat berbagai isu, termasuk dugaan korupsi dan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Kondisi ekonomi yang sulit, di mana masyarakat menghadapi inflasi dan tantangan finansial lainnya, semakin memperlebar jurang ketidakpuasan (Tri Budiarti et al., 2020). Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan "jendela kesempatan" yang optimal bagi mahasiswa untuk melancarkan protes mereka. Mereka mampu memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan keresahan publik yang lebih luas, menjadikan isu kenaikan tunjangan sebagai simbol dari kegagalan sistemik dan ketidakpekaan

para elit politik (Adnan & Nasrullah, 2021). Protes mahasiswa kemudian menjadi resonansi dari ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat, mengukuhkan legitimasi moral gerakan mereka di mata publik.

Aksi protes mahasiswa juga menampilkan beragam bentuk aksi yang strategis dan kreatif. Selain orasi yang menjadi ciri khas demonstrasi, mahasiswa juga menggunakan spanduk yang memuat pesan-pesan kritis dan satir, *performance art* yang mengkritik para politisi, serta teater jalanan untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara visual. Aksi-aksi ini dirancang tidak hanya untuk menyalurkan kemarahan, tetapi juga untuk mengedukasi publik dan menciptakan narasi yang kuat (Syahrul Jiwandono & Oktaviyanti, 2020). Di sisi lain, respons pemerintah dan aparat keamanan juga sangat mempengaruhi dinamika gerakan. Respons yang represif, seperti penggunaan kekerasan atau penangkapan, cenderung meningkatkan solidaritas di kalangan mahasiswa dan menarik simpati publik yang lebih besar. Sebaliknya, respons yang lebih persuasif atau dialogis dapat meredam intensitas protes, meskipun tidak selalu berhasil menghentikan gerakan sepenuhnya (Anshori et al., 2023).

Interaksi antara demonstran dan aparat keamanan menjadi salah satu momen kritis dalam dinamika aksi. Ketegangan yang terjadi sering kali mencerminkan konflik yang lebih besar antara kekuatan sipil dan kekuatan negara. Keputusan aparat untuk bertindak represif atau humanis dapat secara signifikan mengubah arah dan momentum gerakan (Anisa, 2021). Respons pemerintah pasca-demonstrasi, seperti janji untuk meninjau ulang kebijakan atau dialog dengan perwakilan mahasiswa, juga menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan aksi. Analisis terhadap dinamika ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa bukanlah entitas statis, melainkan respons dinamis terhadap interaksi antara kekuatan internal (mobilisasi) dan kekuatan eksternal (kondisi politik dan respons pemerintah), yang bersama-sama membentuk jalan cerita dan dampak dari protes tersebut.

Refleksi dan Tantangan Pasca-Aksi

Analisis terhadap dampak pasca-aksi dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan mahasiswa adalah bagian krusial untuk memahami keberhasilan dan keberlanjutan perjuangan mereka. Dalam konteks ini, evaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari demonstrasi menjadi penting. Secara jangka pendek, tuntutan mahasiswa jarang dipenuhi secara instan. Kenaikan tunjangan anggota DPR, yang menjadi pemicu demonstrasi, sering kali tetap diberlakukan, meskipun dengan penundaan atau modifikasi. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekokohan posisi politik para pembuat kebijakan, kurangnya kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) mahasiswa, atau respons pemerintah

yang cenderung defensif. Namun, terlepas dari kegagalan tersebut, dampak jangka panjangnya lebih signifikan. Aksi mahasiswa seringkali berhasil meningkatkan kesadaran publik dan memicu perdebatan yang lebih luas di media, forum publik, dan bahkan di kalangan para politisi sendiri (Sahendra et al., 2023). Gerakan ini memaksa para pemegang kekuasaan untuk mempertimbangkan kembali legitimasi kebijakan mereka di mata rakyat, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung.

Gerakan mahasiswa juga tidak luput dari tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal yang sering kali mengancam keberlanjutan gerakan adalah potensi kooptasi politik. Beberapa pemimpin mahasiswa mungkin tergoda untuk bergabung dengan partai politik atau lembaga pemerintah, yang dapat menggerus independensi dan idealisme gerakan. Selain itu, perpecahan internal akibat perbedaan pandangan politik atau strategi juga dapat melemahkan solidaritas. Fenomena kelelahan aktivis (*activist burnout*) juga menjadi isu serius, di mana para pejuang kehilangan motivasi akibat perjuangan yang panjang dan minimnya hasil nyata. Sementara itu, tantangan eksternal tak kalah berat. Gerakan mahasiswa sering kali menghadapi stigmatisasi oleh media, yang bisa menggambarkan mereka sebagai kelompok anarkis atau provokator (Arbinata & Warsono, 2021). Upaya de-politisasi kampus melalui kebijakan pemerintah atau otoritas universitas juga sering dilakukan untuk membatasi ruang gerak mahasiswa dalam berekspresi dan berorganisasi.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, peran mahasiswa dalam isu keadilan sosial tetap fundamental. Aksi mereka menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai penjaga moral dan nurani bangsa. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, mahasiswa adalah kelompok yang secara idealis dan intelektual terlatih untuk mempertanyakan ketidakadilan struktural. Mereka memiliki akses terhadap pengetahuan, teori-teori kritis, dan lingkungan yang mendukung diskusi terbuka, yang membentuk kesadaran mereka untuk bertindak sebagai pengingat kritis bagi para pemegang kekuasaan (Yorri Didit Setyadi et al., 2021). Meskipun tuntutan mereka tidak selalu langsung terpenuhi, kehadiran mereka di ruang publik menciptakan tekanan yang memaksa elit politik untuk lebih transparan dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, gerakan mahasiswa tidak hanya bisa diukur dari keberhasilan langsungnya dalam mengubah kebijakan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga dinamika demokrasi. Mereka adalah katalisator perubahan sosial yang tidak hanya berjuang untuk isu tertentu, tetapi juga untuk prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap aksi protes mahasiswa, terlepas dari hasilnya, berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuasaan harus selalu diimbangi oleh suara rakyat, dan

bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk warga negara yang berani bersuara dan berjuang untuk masyarakat yang lebih adil (Obet, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Demonstrasi mahasiswa atas kenaikan tunjangan anggota DPR bukanlah sekadar protes sesaat, melainkan fenomena sosial yang kompleks dan multi-dimensi. Analisis dari perspektif sosiologi pendidikan menunjukkan bahwa aksi ini adalah cerminan dari peran fundamental mahasiswa sebagai agen perubahan yang dibentuk oleh institusi pendidikan untuk memiliki kesadaran kritis dan idealisme. Gerakan ini juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan fungsional dalam sistem politik dan konflik sosial antara kekuasaan elit dan aspirasi rakyat. Kegagalan institusi negara untuk merespons dengan bijaksana memvalidasi peran mahasiswa sebagai pengawas sosial yang vital, mengingatkan para pemegang kekuasaan akan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan analisis ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Institusi pendidikan tinggi harus memperkuat perannya dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Kurikulum perlu dirancang untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan pemikiran kritis, empati, dan keberanian untuk bertindak. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga legislatif perlu lebih responsif dan peka terhadap tuntutan publik. Kenaikan tunjangan atau kebijakan lain yang sensitif harus melalui proses konsultasi yang transparan dan melibatkan partisipasi publik, agar tidak memicu keresahan yang lebih luas. Respons yang reaktif dan represif hanya akan memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat.

Fenomena gerakan mahasiswa ini membuka banyak peluang untuk studi lanjutan. Salah satu area yang menarik adalah penelitian tentang efektivitas gerakan mahasiswa dalam mempengaruhi kebijakan publik di masa depan. Perlu diteliti secara mendalam sejauh mana demonstrasi berhasil mengubah kebijakan atau setidaknya memicu pergeseran wacana politik. Selain itu, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan mobilisasi dan dampak gerakan mahasiswa di berbagai negara dengan konteks politik yang berbeda.

Studi lain yang relevan adalah tentang peran media sosial dalam mobilisasi politik mahasiswa secara berkelanjutan. Bagaimana algoritma media sosial, penyebaran informasi, dan narasi digital memengaruhi partisipasi dan keberlanjutan gerakan? Melalui studi-studi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran mahasiswa dalam menjaga dinamika demokrasi dan mendorong keadilan sosial di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, A., & Nasrullah, N. (2021). Kajian penetapan tunjangan perumahan ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5(2), 213–234. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.698>
- Adolph, R. (2022). Berbakti untuk negeri selamanya menginspirasi.
- Amri, A. S. (2023). Peran mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1), 29–34.
- Anisa, A. (2021). Tindak represif aparat kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8), 288–299. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.521>
- Anshori, I., Aulia, F., & Nadiyya, A. (2023). Peran ruang digital sebagai sosial mahasiswa melalui platform sosial media (pp. 343–362).
- Arbinata, F., & Warsono, W. (2021). Konstruksi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tentang demonstrasi sebagai saluran penyampaian aspirasi politik. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(1), 109–123. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n1.p109-123>
- Barung, A. A. Y. (2023). Gerakan mahasiswa di Indonesia dan tantangannya terhadap hegemoni negara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.82612>
- Fithroyatirrizqoh, N. A. Z. (2024). Mengkaji keefektifan gerakan mahasiswa dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah melalui demonstrasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 491–504.
- Gultom, F., & Fauzi, A. M. (2021). Demo penolakan RUU Cipta Kerja dalam kacamata teori konflik sosiologi. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 53–67. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>
- Hanung Rahma Aulia, A., Galih Setyawan, K., & Imron, A. (2024). Pengaruh partisipasi organisasi kemahasiswaan terhadap kepercayaan diri mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. *Dialektika Pendidikan IPS*, 4(4), 1–15.
- Iskandar, A. M. (2023). Pengantar sosiologi pendidikan (1st ed., Vol. 17). Kencana.
- Isma, N., & Yusuf, M. (2025). Peran organisasi kemahasiswaan dalam penguatan demokrasi mahasiswa di FKIP Universitas Riau. *Jurnal Community Service and Innovation of Teacher Education (JCOSITTE)*, 5(1), 211–215. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Khairul Rahmat, H., Subaidah, S., Darojah, I., & Mulyana, A. (2025). The relevance of critical education in facing various challenges of contemporary education. *Counselling Research and Applications*, 5(1), 23–42.
- Krisnanto, T. (2023). Analisis framing pemberitaan demonstrasi Surakarta terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di Solopos.com. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2).

- Maulana, A. (2022). Pengaruh gerakan mahasiswa terhadap upaya penegakan demokrasi di Thailand pada masa pemerintahan PM Prayuth Chan-Ocha (2014–2020). *Universitas Islam Indonesia*, 5(8.5.2017).
- Maulani, A. (2025). Gaji DPR: Antara legitimasi hukum dan krisis empati publik. *Universitas Internasional Batam*. <https://www.uib.ac.id/gaji-dpr-2025-tunjangan-anggota-dewan/>
- Mukhtar, & Lailam, T. (2021). Problem etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik yang independen dan imparial. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 265–278.
- Muthi'ah Lathifah, & Yakobus Ndona. (2024). Peran pendidikan dalam membangun kemanusiaan yang beradab. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3764>
- Nastatih, H., & Rachmaria, L. (2020). Pembingkaihan pemberitaan demonstrasi mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (analisis framing Robert M. Entman pada media online Tribunnews.com periode 23–24 September 2019). *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 78–85. <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.681>
- Nendissa, J. E. (2022). Teori konflik sosiologi modern terhadap pembentukan identitas manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4, 69–76.
- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan sosial baru Indonesia: Studi gerakan Gejayan Memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 185–210. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.2163>
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194. <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>
- Nunik Hidayati, R., Widiawati, R., Al-Madury, Z. Q. A. S., Nabilah, F., Mardikaningsih, R., Issalillah, F., Masnawati, E., Mala, A., & Masfufah, M. (2024). Membangun kesadaran sosial melalui kegiatan pengajaran dasar-dasar kehidupan sosial pada mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(6), 30–43. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i6.1145>
- Obet, R. (2024). Aktivis mahasiswa: Agen perubahan untuk demokrasi di Indonesia. *Airlangga University*. <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/01/26/aktivis-mahasiswa-agen-perubahan-untuk-demokrasi-di-indonesia/>
- Pane, G., & Haryanto. (2023). Pengaruh e-government, gaji dan tunjangan PNS, dan produk domestik regional bruto sebagai probabilitas terjadinya korupsi di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9.
- Raho, B. (2019). *Sosiologi agama* (1st ed.). Ledalero.
- Ruagadi, H. A., Yakobus, I. K., Tobondo, Y. A., Ngguna, Y., Abidjulu, R. Z. W., & Balingki, A. (2025). Pendidikan inklusif sebagai sarana mitigasi konflik sosial budaya: Studi kepustakaan dalam perspektif sosiologi pendidikan. *Jurnal Pandelo'e Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Tentena*, 5(1), 39–48.

- Sahendra, Y., Amanda, S. R., Faradela, S. A., Fahrimal, Y., & Husna, A. (2023). Revitalisasi peran pemuda dalam gerakan sosial peduli perubahan iklim di era digital. *Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media*, 4(1), 1–14. <https://jasima.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/jasima/article/view/57>
- Saputra, M. R. (2025). Public ethics and the legitimacy of Indonesian democracy: Protests over DPR allowances, elite conflict, and civil response. *Etika Publik*, 1(1), 1–10.
- Setyoko, J., & Satria, M. D. (2021). Gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.15>
- Subaktiar, M. I. (2020). Gerakan mahasiswa dalam novel *Lelaki di Tengah Hujan* karya Wenri Wanhar (kajian mobilisasi sumber daya). *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 7(4), 10. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/35016>
- Syahrul Jiwandono, I., & Oktaviyanti, I. (2020). Analisis aksi demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara sikap kritis dan narsis. *Asketik*, 4(1), 154–162. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i1.1575>
- Teresia Noiman Derung. (2025). *Sosiologi pendidikan agama* (1st ed.). STP-IPI Malang.
- Tri Budiarti, R., Aqrobah, L., & Gerung, J. (2020). Ketimpangan gaji DPR & rakyat akibat demokrasi liberal. *Institut Muslimah Negarawan*, 1–13.
- Trisiana, A., & Syakti, D. (2021). Peran mahasiswa sebagai agent of change dalam implikasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 103–119.
- Yorri Didit Setyadi, D., Wulandari, D., Lestari, L. D., Meliasari, W. O., & Sari, I. N. (2021). Peran mahasiswa Kampus Mengajar 2 sebagai agent of change dan social control. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(6), 1542–1547. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.8592>